

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Ekonomi Pembangunan

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang.¹ Diantara ciri menonjol negara terbelakang ialah ekspornya ke nagara lain sama sekali terdiri dari bahan mentah, hasil tambang, atau buah-buahan, atau beberapa bahan makanan dan mungkin ditambah dengan sedikit hasil kerajinan tangan yang halus. Penanaman atau pengusahaan eksor bahan mentah sering berada di tangan perusahaan asing.² Adapun ciri-ciri yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan Umum.

Sejauh ini, untuk mengukur tingkat kemiskinan negara digunakan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang didata oleh Bank Dunia. Kemiskinan umum yang dimaksud disini adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita dalam kategori miskin yang kriterianya ditetapkan oleh Bank Dunia.

b. Pertanian merupakan mata pencaharian utama.

Negara yang menitik beratkan sumber perekonomian pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dapat dikategorikan sebagai negara yang miskin. Pada umumnya, sektor primer kurang memiliki nilai tambah. Sehingga pendapatan

¹ M. L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning (Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan)*, terj. D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm. 3

² *Ibid.*, Hlm. 15

yang diperoleh dari sektor ini hanya terbatas. Suatu bahan akan memiliki nilai tambah jika ia mengalami proses pengolahan dengan berbagai inovasi sehingga membentuk barang baru yang lebih menarik dan bernilai.

c. Ekonomi Dualistis.

Dalam hal ini, kegiatan perekonomian memiliki dua wajah yang berbeda bahkan cenderung bertolak belakang. Perekonomian yang demikian ini menimbulkan kesenjangan. Di satu sisi ada yang maju dan di sisi lain tetap terbelakang.

d. Sumber Alam kurang Terolah.

Sumber alam kurang terolah dalam hal ini biasanya diakibatkan karena rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia. Situasi seperti ini terkadang menyebabkan negara mendatangkan tenaga ahli dan terampil dari luar negeri. Negara dapat dikuasai perekonomiannya oleh negara lain jika negara tersebut tidak segera memperbaiki sumber daya manusia untuk mengelola sendiri.

e. Ciri Demografi.

Ciri demografi negara miskin biasanya ditandai dengan wilayah yang sempit, kepadatan penduduk berlebih, serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ketika jumlah penduduk meningkat secara terus-menerus dan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas serta peningkatan pendapatan, maka tingkat pendapatan akan rendah. Sebab

angka ketergantungan sangat tinggi akibat tingginya usia yang tidak produktif.

f. Pengangguran dan Pengangguran tersembunyi.

Tingginya tingkat pengangguran merupakan indikasi bahwa suatu negara merupakan negara yang miskin. Pada dasarnya, semakin tinggi angka pengangguran maka pendapatan per kapita akan turun. Beban negara akan bertambah, berbagai masalah akan muncul dan memperparah masalah perekonomian dan kemiskinan dalam suatu negara.

g. Keterbelakangan Ekonomi.

Di semua negara terbelakang, dicirikan secara khusus oleh keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, beberapa faktor yang tidak mobil, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan dan dalam perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi.

h. Ketiadaan inisiatif dan Usaha.

Pada negara yang terbelakang, kemampuan dan keinginan untuk melakukan wirausaha sangat rendah. Banyak hal yang melatarbelakanginya antara lain terbatasnya modal, pengetahuan, ketrampilan, akses terhadap teknologi, lingkungan miskin (daya beli rendah) yang mengakibatkan hambatan dalam melakukan wirausaha, dan berbagai faktor lainnya.

i. Kelangkaan Alat Modal.

Negara yang terbelakang dapat dikatakan miskin akan modal, tingkat tabungan dan investasi yang rendah. Dengan rendahnya sumber modal yang berupa investasi ini, maka dorongan akan pertumbuhan ekonomi akan rendah. Apalagi jika hal ini ditambah lagi dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka berbagai masalah akan timbul. Bukan hanya masalah keparahan ekonomi tapi juga masalah sosial politik.

j. Keterbelakangan Teknologi.

Negara yang miskin dengan kemampuan ekonomi rendah, maka akan sukar baginya untuk mengubah penggunaan teknik yang tradisional menuju ke teknik modern yang lebih praktis. Untuk menggunakan teknologi yang modern dibutuhkan dana yang cukup besar. Akibatnya, kemajuan teknologi akan lambat masuk ke negara yang terbelakang.

k. Orientasi perdagangan Luar Negeri.

Biasanya negara terbelakang memiliki orientasi pada perdagangan luar negeri. Ini dapat dilihat dari banyaknya hasil sektor primer yang diekspor ke luar negeri, akibatnya akan rentan terpengaruh dengan fluktuasi harga internasional dan terjadinya kecenderungan atau ketergantungan terhadap luar negeri, dan pengembangan produk mungkin terhambat karena fokus hanya untuk ekspor bahan.

Hambatan dalam pembangunan Ekonomi:

1. Lingkaran setan Kemiskinan.

Lingkaran setan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya, selalu kurang makan, karena kurang makan kesehatannya menjadi buruk. Karena fisiknya lemah, maka kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah, dan berarti ia miskin. Akhirnya ia tidak mempunyai cukup makan, dan seterusnya.³

2. Tingkat pembentukan modal yang rendah

Kelangkaan modal bersumber dari lingkaran setan yang disebutkan di atas. Rendahnya tingkat pendapatan seseorang mengakibatkan pendapatan hanya dapat memenuhi kebutuhan primer berupa sandang pangan dan papan. Sehingga tidak tersisa atau rendahnya tabungan. Tabungan yang rendah berarti tingkat investasi juga rendah, dan sulit untuk melakukan usaha atau inovasi akibat terbatasnya modal.

Modal disini tidak hanya terbatas pada modal berupa uang atau barang, tapi juga modal berupa sumber daya manusia. Manusia merupakan modal dalam pembangunan ekonomi. Ketika kualitas manusia baik, maka sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya pembangunan ekonomi akan tercapai. Sebaliknya apabila kualitas manusia rendah, baik dari segi kemampuan, pendidikan maupun kesehatan, maka hal ini akan

³ *Ibid.*,, Hlm. 33

menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan menyebabkan munculnya berbagai masalah.

3. Hambatan Sosio-Budaya.

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusiawi, sikap sosial, kondisi politik, dan latar belakang sejarah.⁴ Dalam kehidupan, masyarakat erat kaitannya dengan adat istiadat yang melekat dan turun-temurun. Meskipun mungkin kemajuan dan dunia semakin modern, akan tetapi kepercayaan masyarakat akan budaya dan adat akan menjadi hambatan bagi kemajuan apalagi jika suatu ilmu pengetahuan baru bertentangan dengan adat yang ada, maka akan sulit bagi kemajuan untuk mengubah keyakinan yang sudah turun temurun tersebut.

4. Dampak kekuatan internasional.

Pada negara yang rendah tingkat tabungan dan investasinya, maka solusi untuk mendorong perekonomian negara adalah dengan cara membuka penanaman modal asing untuk menanamkan modalnya ke negara tersebut. Hal ini tentu memiliki dampak yang baik dan buruk. Ketika modal asing dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara maksimal, maka akan mendorong perbaikan ekonomi. Namun seringkali, hal ini akan menimbulkan dominasi oleh pihak luar dan keuntungan yang diperoleh akan lebih banyak mengalir ke pihak luar.

Tujuan Ekonomi Islam yaitu:

⁴ *Ibid.*, Hlm. 37

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan menimbulkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Pada sistem ekonomi Islam terdapat lima instrumen yang strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Lima instrumen itu adalah sebagai berikut:

1. Zakat.
2. Pelarangan riba.
3. Kerjasama ekonomi
4. Jaminan sosial
5. Peranan Negara.

Peranan negara dalam pelaksanaan instrument islam di Indonesia dapat dilihat pada proses berdirinya Lembaga Ekonomi Syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syaria, Obligasi Syariah, Dana Reksa Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dan sebagainya.

Peran negara dalam perekonomian diantaranya yaitu:

1. Menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi.
2. Mengelola hak milik umum dan negara
3. Menjaga mekanisme pasar
4. Pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi.⁶

QS. An-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءِ الْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (malakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷

⁵ *Ibid.*, Hlm. 57

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 38-39

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga, Edisi Sakinah...* Hlm. 277

2. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.⁸

Secara umum pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Pertumbuhan Alami.
- b. Pertumbuhan Migrasi
- c. Pertumbuhan Penduduk Total.⁹

Keterangan:

- a. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diketahui dari perhitungan selisih dari jumlah kelahiran dan jumlah kematian.
- b. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diketahui dari selisih jumlah migrasi masuk dengan jumlah migrasi keluar.
- c. Pertumbuhan penduduk total adalah jumlah dari seluruh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian migrasi serta emigrasi. Jadi untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total adalah dengan cara menambah selisih dari jumlah kelahiran dan kematian dengan selisih jumlah dari imigrasi dengan emigrasi.

⁸ Restu Ratri Astuti A, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Prtumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2004-2014", Hlm. 22 dalam http://eprints.uny.ac.id/17756/1/skripsi%20full_Restu%20Ratri%20Astuti_10404244017.pdf diakses pada 13-12-2017

⁹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Cetakan Ke 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hlm. 106

Tingkat kelahiran di negara-negara berkembang pada umumnya sangat tinggi, yaitu berkisar antara 30-40 untuk setiap 1.000 penduduk, sedangkan di negara-negara maju kurang dari setengahnya. Tingkat kelahiran kasar (*crude birthrate*), yakni jumlah bayi yang lahir per tahun dan hidup setiap 1.000 penduduk, merupakan cara yang paling baik untuk membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Berdasarkan tolok ukur tersebut kita bisa menebak dengan mudah apakah negara tersebut termasuk negara berkembang atau negara maju. Sedikit sekali negara berkembang yang mempunyai tingkat kelahiran dibawah 20 untuk setiap 1.000 penduduknya. Sementara itu, tidak ada satupun negara maju yang memiliki tingkat kelahiran sebesar itu.

Tingkat kematian (*death rates*), yakni jumlah orang yang meninggal setiap 1.000 penduduk per tahun, di negara-negara Dunia Ketiga juga relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, berkat adanya usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit menular, kini selisih tingkat kematian antara negara berkembang dengan negara maju lebih kecil daripada perbedaan tingkat kelahirannya. Namun, hal ini membawa akibat buruk, yakni rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun di negara berkembang menjadi begitu tinggi, yakni mencapai 1,6 persen per tahun, sedangkan di negara maju hanya mencapai 0,7 persen per tahun.

Angkatan kerja pada negara-negara berkembang harus menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-anak secara proporsional jumlahnya hampir dua kali lipat dibanding dengan yang ada di negara-negara kaya. Di pihak lain proporsi penduduk yang berumur di atas 65 tahun jauh lebih besar di negara maju. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (*dependency burden*). Artinya mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif, sehingga menjadi beban angkatan kerja yang produktif. Secara keseluruhan beban ketergantungan itu (baik yang berupa orang lanjut usia atau anak-anak) di negara-negara maju mencapai sekitar 45 persen. Selain itu, di negara-negara berkembang, beban ketergantungan yang terdiri dari anak-anak hampir mencapai 90 persen, sedangkan di negara kaya sekitar 66 persen.¹⁰

Sehingga dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa pada negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara maju karena tingkat

¹⁰ Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, Devri Barnadi (Eds), *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan, Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm. 81-82

kelahiran yang tinggi yang dibarengi dengan upaya peningkatan kesehatan penduduk yang menyebabkan angka kematian berkurang. Karena tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian, maka beban ketergantungan pada negara tersebut relatif tinggi karena anak usia kurang dari 15 tahun, dan orang tua usia lebih dari 64 tahun dianggap tidak produktif, dan mereka menjadi beban bagi angkatan kerja yang produktif. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pertumbuhan perekonomian, maka pembangunan pada suatu negara akan terhambat dan justru akan memperparah kemiskinan. Dari sinilah diperlukan adanya pengendalian terhadap jumlah penduduk.

Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk (*rate of population increase*) di hitung atas dasar presentase kenaikan relatif (atau presentase penurunan, yakni dalam kasus pertambahan penduduk yang negatif) dari jumlah penduduk neto per tahun yang bersumber dari pertambahan alami (*natural increase*) dan migrasi internasional neto (*net international migration*). Adapun yang dimaksud pertumbuhan alami adalah selisih antara jumlah kelahiran dan kematian di suatu negara, atau istilah yang lebih teknis, selisih antara fertilitas dan mortalitas. Sedangkan migrasi internasional neto adalah selisih antara jumlah penduduk yang beremigrasi dan berimigrasi.¹¹

Terdapat dua alasan pokok yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi pertumbuhan penduduk. Pertama, tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan hanya dalam waktu singkat. Kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan institusional yang mempengaruhi tingkat fertilitas yang telah ada dan bertahan selama berabad-abad tidak mudah hilang begitu saja hanya karena himbauan dari para pemimpin nasional. Sedangkan alasan kedua atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat sekali kaitannya dengan struktur usia penduduk di negara-negara berkembang.¹²

¹¹ *Ibid*,... Hlm. 318

¹² *Ibid*,...Hlm. 323

Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara, namun yang menjadi masalah sebenarnya adalah dampak dari pertumbuhan penduduk itu sendiri diantaranya adalah :

a. Keterbelakangan

Dengan adanya pemikiran tradisional bahwa banyak anak banyak rejeki, hal ini mengakibatkan para orang tua yang berpendidikan rendah, berasumsi bahwa untuk meningkatkan kehidupannya ia harus punya banyak anak untuk kelak dapat menjamainya di hari tua. Gaya fikir terbelakang seperti ini yang sulit diubah meskipun pemerintah telah menyarankan jaminan sosial, namun kepercayaan masyarakat kalangan sulit untuk diubah melainkan karena motivasi dari diri mereka sendiri.

b. Penyusutan pada sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

Dampak dari penambahan jumlah penduduk menjadikan lahan sempit. Banyak tanah yang dijadikan pemukiman menyebabkan berkurangnya lahan hijau, akibatnya keseimbangan alam terganggu dan ketersediaan sumber pangan serta sumber daya alam akan terus-menerus berkurang karena terus digali untuk kebutuhan manusia.

c. Penyebaran penduduk yang tidak merata.

Penyebaran penduduk yang tidak merata akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di suatu daerah. Tanah merupakan salah satu modal dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan penduduk

terlalu tinggi di daerah yang memiliki wilayah sempit dan sumberdaya yang hampir terbatas karena digali terus-menerus, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terutama pendapatan akan rendah jika dibanding dengan daerah yang masih luas dengan sumber daya yang masih melimpah dan pertumbuhan penduduk yang rendah.

d. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah

Tingginya angka kelahiran mengakibatkan jumlah penduduk meningkat. Dalam suatu keluarga, dapat mengakibatkan meningkatnya angka ketergantungan atau beban bagi usia produktif. Pada keluarga menengah kebawah, mereka akan kesulitan untuk memberikan pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk anaknya. Pendapatan yang diperoleh seringkali diprioritaskan untuk kebutuhan pangan, seringkali keluarga miskin kurang terpenuhi kebutuhan gizinya, hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan. Dengan kesehatan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya pendidikan. Pada kasus yang terjadi di Indonesia banyak sekali anak usia sekolah yang berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya bekerja.

Analisis ekonomi tentang posisi penduduk sebenarnya sudah dimulai sejak Adam Smith yang mengemukakan bahwa sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: sumber manusiawi (jumlah penduduk), sumber alam dan stok kapital yang ada. Perkembangan selanjutnya tentang analisis posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi sejalan dengan lahirnya teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom menyinggung keterkaitan penduduk

dalam pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.¹³

Tekanan penduduk pada standar kehidupan akan melahirkan tekanan balik, dalam hal ini melahirkan kegiatan yang dirancang untuk mempertahankan atau memperbaiki standar kehidupan sehingga kemampuan penduduk untuk menguasai lingkungannya dan untuk mengorganisasikan diri menjadi semakin baik.¹⁴

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.¹⁵

Dengan berlangsungnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kelompok negara-negara *High Performing Asian Economies* (HPAEs) mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.¹⁶

3. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.¹⁷

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.¹⁸

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran adalah orang yang tergolong angkatan kerja namun belum memiliki kerja secara tetap dan atau bekerja namun dengan jam

¹³ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis*,.. Hlm. 107

¹⁴ M. L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning*... Hlm. 406

¹⁵ Subandi, Riduwan (Ed), *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 88

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 90

¹⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm. 472

¹⁸ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis*,.. Hlm. 107

kerja yang kurang dari jam normal serta orang yang bekerja hanya pada musim tertentu. Seperti halnya jenis pengangguran bermacam-macam baik berdasarkan penyebab dan ciri dari pengangguran itu sendiri. Sedangkan orang dewasa yang tidak bekerja seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, tidak digolongkan sebagai pengangguran sebab ia tidak mencari pekerjaan secara aktif.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya sebagai kegiatan pribadi.¹⁹

Dalam membedakan jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu:

- a. Berdasarkan kepada sumber/ penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut.
- b. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud.²⁰

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan kepada jenis pengangguran berikut:

- a. Pengangguran Normal atau Fraksional.

Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari

¹⁹ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses pada 21-5-2018

²⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Cet. 23*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 328

pekerjaan lain yang lebih baik.²¹ Sehingga dalam kondisi seperti ini orang tersebut sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, akan tetapi ia berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Pada kasus yang tengah terjadi di masyarakat saat ini, banyak dari para angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan yang diharap (menunggu panggilan) sedangkan kehidupan terus berlanjut dan untuk bertahan hidup banyak dari mereka yang bekerja untuk sementara di sektor informal.

b. Pengangguran Siklikal.

Kemerosotan harga komoditas mengakibatkan efek pada perusahaan yang akan mengalami kemerosotan permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja/ menutup perusahaannya.²²

Sehingga pada pengangguran jenis ini diakibatkan dari harga komoditas yang turun dan mengakibatkan pendapatan dari perusahaan menurun akibat permintaan akan barang produksi rendah. Hal ini mengakibatkan pengusaha untuk melakukan tindakan pengurangan beban perusahaan melalui pemutusan hubungan kerja dengan sebagian karyawan yang dirasa kurang produktif atau menutup usahanya.

c. Pengangguran Struktural.

Kemerosotan yang timbul oleh beberapa faktor: wujud barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi

²¹ *Ibid*,...Hlm. 328

²² *Ibid* ..Hlm. 329

industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Hal ini yang dinamakan pengangguran struktural karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.²³

Sehingga yang menjadi ciri pengangguran ini adalah adanya kemajuan perekonomian pada negara lain, namun pertumbuhan tidak terjadi pada suatu negara, sehingga mengakibatkan perekonomian negara tersebut tertinggal dari lainnya. Terdapat tiga hal penyebab terjadinya pengangguran struktural: perkembangan teknologi, kemunduran akibat persaingan dengan luar negeri atau luar daerah, dan kemunduran perekonomian pada suatu wilayah akibat kemajuan pesat daerah/wilayah lain.

d. Pengangguran Teknologi.

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Sehingga pemutusan hubungan kerja karyawan yang dilatarbelakangi oleh penggantian tenaga manusia dengan mesin merupakan pengangguran jenis ini.

Jenis pengangguran Berdasarkan cirinya:

a. Pengangguran terbuka

²³ *Ibid*,... Hlm. 329

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dan penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.²⁴

Pengangguran terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena mereka tidak mungkin mendapat pekerjaan.
 - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.²⁵
- b. Pengangguran tersembunyi
- Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.²⁶
- c. Pengangguran bermusim
- Pengangguran ini terutama terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya, disamping itu umumnya para pesawah tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai.
- d. Setengah menganggur
- Di negara-negara berkembang penghijrah atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu adapula yang tidak menganggur,

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 330

²⁵ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses pada 21-5-2018

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 330

tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.²⁷

Penyebab pengangguran:

- a. Proses mencari kerja
- b. Kekakuan upah
- c. Efisiensi upah²⁸

Keterangan:

- a. Proses mencari kerja. Setiap tahunnya jumlah angkatan kerja selalu mengalami peningkatan, hal ini mengakibatkan semakin ketatnya seleksi dalam kerja. Berbagai pertimbangan angkatan kerja menjadikan mereka terus mencari sehingga menemukan pekerjaan yang cocok, namun seringkali informasi tentang pekerjaan terutama mengenai gaji kurang sesuai dengan informasi yang ada.
- b. Pada keadaan produksi yang mengalami penurunan, akan mengakibatkan penurunan pada permintaan tenaga kerja. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat upah yang ditetapkan sebagai akibat penurunan dari produksi.

Pada dasarnya upah dan gaji merupakan kompensasi sebagai kontra prestasi atas pengorbanan pekerja. Upah dan gaji pada umumnya diberikan atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan maupun disetujui bersama berdasarkan *personal contract*.²⁹ Upah menurut Hasibuan adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan pedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.³⁰

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 331

²⁸ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis*,.. Hlm. 114

²⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja, Edisi Lima*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), Hlm. 298

³⁰ Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 122

c. Ketika perusahaan memutuskan untuk memberi upah lebih untuk meningkatkan produktivitas pekerja, maka hal ini akan menimbulkan usaha yang lebih keras dari pekerja untuk memperoleh posisi pekerjaan yang diinginkannya. Hal ini tentu akan mendorong terjadinya peningkatan kinerja pekerja dan juga persaingan antar pekerja. Disisi lain, hal ini akan menjadinya yang lemah tersingkir dan menjadi pengangguran terpaksa akibat persaingan yang ketat dalam mendapat pekerjaan yang diinginkan.

Pengangguran membawa dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat serta pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai dampak antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dampak Non-ekonomis (sosial)
- b. Dampak Ekonomis.
- c. Mendorong Ketidakstabilan Politik Dan Keamanan Nasional.³¹

Keterangan:

- a. Dampak Non-ekonomis (sosial)

Dampak non ekonomis ini terlihat dari cara seorang penganggur bersikap. Biasanya orang yang menganggur merasa minder, malas, malu, sensitif (terlalu peka), merasa rendah harga diri. Dampak yang paling parah dari pengangguran secara sosial ini adalah kehancuran rumahtangga orang yang pengangguran. Keadaan demikian ini menjadikan seseorang melakukan tindakan diluar moral.

³¹ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 483

b. Dampak Ekonomis

Secara ekonomi, dengan meningkatnya jumlah pengangguran akan menyebabkan input dari seseorang berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan demikian maka, hal ini akan menurunkan pendapatan nasional. Ketika penghasilan seseorang rendah dan tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka akan menambah jumlah kemiskinan.

c. Mendorong Ketidakstabilan Politik Dan Keamanan Nasional.

Semakin tinggi tingkat pengangguran dalam suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan dan kejahatan dalam wilayah tersebut. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi, maka hal ini akan menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perampokan dan pencurian. Semakin tinggi tingkat kejahatan, maka akan mengancam keamanan negara.

Banyak di antara penduduk yang digolongkan bekerja (definisi sensus) tenaganya belum termanfaat secara penuh. Dalam sensus penduduk yang digolongkan bekerja seperti yang diterapkan pada Sensus Penduduk 1980 adalah:

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu.

- b. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi mereka adalah:
- 1) Pekerja tetap, pegawai-pegawai Pemerintah atau Swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan pekerjaannya sementara (misalnya karena kerusakan mesin) dan sebagainya.
 - 2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap dan sebagainya.
 - 3) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat, dalang dan sebagainya.³²

Definisi yang diterapkan itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap angka-angka Reit Pengangguran (pengangguran terbuka) yang diperoleh, seperti rendahnya angka-angka Reit Pengangguran penduduk Jawa Barat. Angka-angka Reit Pengangguran dengan pendekatan *labour force* harus mengandung unsur aktif mencari pekerjaan. Untuk penduduk Indonesia secara keseluruhan, Reit Pengangguran terbuka juga rendah misalnya 1,7 persen pada tahun 1980 dan 3,2 persen pada tahun 1990, kemudian agak meningkat pada tahun 2000 menjadi 5,03 persen. Reit Pengangguran relatif lebih tinggi untuk daerah perkotaan dibandingkan dengan untuk daerah pedesaan.

Islam telah mengajarkan umatnya untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Telah disebutkan bahwa Allah sesuai perkiraan umatnya, Allah juga tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha. Dalam hal ini jelaslah bahwa berusaha dan bekerja sesuai kemampuan adalah kewajiban kita. Hal ini diperjelas dalam QS. Az- Zumar 39:

قُلْ يَعْزِمُ اعْمَلُوا عَلَيَّ مَا كُنْتُمْ

*Katakanlah:” Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian.”*³³

³² Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: LP3ES, 2012), Hlm. 122-123

4. Kesehatan

Menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, ruhani ataupun akal, sosial dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya.³⁴

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 memberikan batasan: kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut WHO yang paling baru ini, memang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada batasan yang terdahulu kesehatan itu hanya mencakup tiga aspek, yakni: fisik, mental dan sosial. Tetapi menurut Undang-Undang No. 23/1992, kesehatan itu mencakup 4 aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi.³⁵

Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan seimbang yang dinamis dan seimbang antara bentuk tubuh dan fungsi yang dapat mengadakan penyesuaian, sehingga dapat mengatasi gangguan dari luar. Kondisi kesehatan harus menjadi perhatian karena pekerja adalah penggerak atau aset konstruksi. Jadi, kondisi fisik harus maksimal dan sehat agar tidak mengganggu proses kerja sebagaimana dikemukakan WHO tahun 1995, bahwa kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk mempertahankan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jabatan.³⁶

Wujud atau indikator dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan individu antara lain sebagai berikut:

- a. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh.
- b. Kesehatan mental (jiwa) ini mencakup 3 komponen, yaitu: pikiran, emosional dan spiritual.

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga, Edisi Sakinah...*, Hlm. 462

³⁴ Ahsin W Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 4

³⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Hlm. 3

³⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan 1, Editor Suryani*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Hlm. 364

- 1) Pikiran yang sehat itu tercermin dari cara berfikir seseorang, yakni mampu berfikir logis (masuk akal) atau berfikir secara runtut.
 - 2) Emosional yang sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih dan sebagainya.
 - 3) Spiritual yang sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian atau penyembahan terhadap sang pencipta alam dan seisinya (Allah Yang Maha Kuasa). Secara mudah spiritual yang sehat itu dilihat dari praktik keagamaan atau kepercayaannya, serta berbuat baik yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.
- c. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain secara baik, atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, saling menghargai dan toleransi.
- d. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat dari produktifitas seseorang (dewasa) dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong hidupnya atau keluarganya secara finansial.³⁷

Definisi ekonomi kesehatan merupakan penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi sumberdaya diantara berbagai upaya kesehatan.
- 2) Jumlah sumberdaya yang digunakan dalam upaya kesehatan.
- 3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan
- 4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan sumber daya.
- 5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.³⁸

Kesehatan di atur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dan mempunyai filosofi sebagai berikut:

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 4

³⁸ Anggit Yoga Permana, "Analisis pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Tawa Tengah tahun 2004-2009" dalam <http://eprints.undip.ac.id/36162/1/PERMANA.pdf> diakses pada 02-11-2017

2. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa sebagai pembangun nasional;
3. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
4. Setiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memerhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.³⁹

Asas dan tujuan memuat tentang Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif dan norma-norma agama.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah hak asasi dari semua manusia, dan semua manusia berhak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat telah mengatur kebijaksanaan kesehatan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009.

Banyak sekali tuntunan agama baik dalam al quran maupun hadis Nabi yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan (kesehatan jasmani, ruhani dan sosial). Upaya untuk memperoleh kesehatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.⁴¹

1. Upaya Promotif

Upaya promotif dibidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kondisi yang baik atau sehat menjadi lebih baik

³⁹Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), Hlm. 29-30

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 32

⁴¹ Ahsin W Alhafidz, *Fikih Kesehatan*,..., Hlm. 14

atau lebih sehat. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran:

Allah berfirman :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al. Baqarah (2): 195)

Rasulullah bersabda:

إِنَّ لِحَدِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Sesungguhnya badanmu mempunyai hal atas dirimu (HR. Bukhori)⁴²

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya mencegah diri dari penyakit.

Manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan memelihara dirinya dengan baik. Dijelaskan pula dalam kata mutiara bahkan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Perintah memelihara diri dan kebersihan sesuai dengan firman

Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertaubat, dan senang kepada orang yang membersihkan diri. (QS. Al-Baqarah (2): 222)

وَتِيَابًا بَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْرُ فَآ هَجْر (5)

Dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala macam kotoran. (QS. Al-Muddatstsir (74): 4-5)⁴³

⁴² *Ibid.*, Hlm. 14-15

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 17

3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif adalah upaya menjaga kesehatan dengan menggunakan terapi dari ayat al quran.

4. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah upaya untuk memperbaiki kondisi yang kurang sehat menjadi sehat.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi.⁴⁴ Bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Ini sesuai dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yaitu kesehatan, pendidikan serta ekonomi. Jika seseorang mempunyai kesehatan yang baik, maka dia akan produktif dan menghasilkan ekonomi serta pendidikan yang baik. Begitu pula jika seseorang berpendidikan yang tinggi dan baik, tentu bisa mencari ekonomi yang sehat dan akan mempunyai kesehatan yang sehat juga. Sehingga tiga indikator pembangunan manusia ini, tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan saling berkaitan.⁴⁵

Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 15

⁴⁵ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), Hlm. 33

⁴⁶ Anggit Yoga Permana, "Analisis pengaruh PDRB, Pengangguran,

5. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁷

Pendidikan merupakan suatu usaha bersama dalam proses terpadu (terorganisir) untuk membantu manusia mengembangkan diri dan mneyiapkan diri guna mengambil tempat semestinya dalam pengembangan masyarakat dan dunianya dihadapan Sang Pencipta. Dengan proses itu, seorang manusia dibantu untuk menjadi sadar akan kenyataan-kenyataan dalam hidupnya, bagaimana dimengerti, dimanfaatkan, dihargai, dicintai, apa kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya agar dapat sampai kepada alam, sesame dan Tuhan, sebagai tujuan hidupnya.⁴⁸

Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Jadi, banyak hal yang dibicarakan ketika kita membicarakan pendidikan. Aspek-aspek yang biasanya paling diertimbangkan antara lain:

- a. Penyadaran.
- b. Pencerahan.
- c. Pemberdayaan.
- d. Perubahan perilaku.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁰

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk

⁴⁷ Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis taklim: Peran Aktif majelis Taklim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2013), Hlm. 12

⁴⁸ Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer, Cetakan Pertama*, Editor: Ali S. Mifka, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), Hlm. 4

⁴⁹ Nurani Soyomukti, Rose Kusumaningratri (Ed), *Teori-teori Pendidikan Tradisional, Neo Liberal, Marxis-Sosialis, Postmodern*, Cetakat 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) Hlm. 27

⁵⁰ Akhmad Muhaimin Azzet, Meita Sandra (Ed), *Pendidikan yang Membebaskan, Cet 1*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Hlm. 15

meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta mengasah potensi pada diri seseorang yang mencakup intelektual, spiritual, dan emosional dengan dibantu oleh orang lain yang lebih berpengalaman baik melalui lembaga formal maupun informal agar ilmu pengetahuan yang diperolehnya berguna untuk membantu diri sendiri, ataupun diterapkan pada masyarakat untuk mencapai tujuan hidup.

Suatu sistem pendidikan yang baik harus mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan pada semua orang agar bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat.
- b. Memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya, demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya.
- c. Menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan.⁵¹

Dasar, fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertuang pada Bab II Pasal 2 dan Pasal 3.

a. Dasar Pendidikan Nasional

Dasar pendidikan di suatu negara diambil dari idiologi yang dianut negara tersebut. Idiologi secara etimologi adalah keyakinan yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan. Maka, otomatis dasar pendidikan bangsa Indonesia diambil dari idiologi yang dianut dan diakui di negara ini. Idiologi negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu dasar pendidikan di negara ini juga tentunya berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana telah dimaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3.⁵²

b. Fungsi Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki fungsi bagi masyarakat, diantaranya yaitu meliputi segala

⁵¹ Nurani Soyomukti, Rose Kusumaningratri (Ed), *Teori-teori Pendidikan ...* Hlm. 32

⁵² Helmawati, *Pendidikan Nasional dan ...*, Hlm. 20

upaya yang menyangkut transformasi budaya yang relevan bagi kelangsungan dan kemajuan manusia dan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia

Fungsi dasar pendidikan dalam pembangunan nasional meliputi:

- 1) Fungsi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat yang telah dituangkan dalam perundang-undangan.
- 2) Fungsi pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam masyarakat industri. Program pendidikan persiapan kerja harus lentur dan selalu berwawasan lingkungan agar pendidikan ketrampilan dan keahlian selalu dapat disesuaikan dengan keutuhan akan jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang selalu berubah.
- 3) Fungsi pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Cakupan dari bagian sistem ini adalah semua program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap jenjang pendidikan.⁵³

c. Tujuan Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan tentunya adalah keberhasilan dari produk atau hasil (output) pendidikan yang diharapkan. Maka minimal ada dua kategori kompetensi yang sekiranya harus dimiliki lulusan pendidikan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi karakteristik.

- 1) Kompetensi akademik menunjukkan manusia yang sehat dan kuat jasaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memiliki iman kuat
- 2) Kompetensi kepribadian menunjukkan manusia lulusan pendidikan dengan karakter beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia: seperti disiplin, jujur, kreatif, ulet, bertanggung jawab, demokratis, juga siap bersaing.⁵⁴

Masalah pendidikan nasional di Indonesia antara lain adalah peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan pendidikan, keterbatasan anggaran yang tersedia, belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional seseuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 22

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 28-29

orang tua. Masalah lainnya yaitu: kecukupan sumber-sumber pendidikan (jumlah dan mutu guru, buku teks, sarana belajar yang memadai), kualitas manajemen sekolah yang masih rendah, alokasi anggaran, adanya ketidakseimbangan antara kompetensi lulusan dengan kompetensi kebutuhan tenaga kerja.⁵⁵

Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak.

Konsekuensinya, negara harus mengupayakan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Pasal 4 ayat 1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003. Siswa disekolah harus merasakan bahwa sekolah bagi mereka sungguh merupakan tempat yang akan menggali potensi yang dimilikinya. Dengan kondisi yang tidak diskriminatif dan berkeadilan, anak yang berasal dari keluarga miskin pun berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan⁵⁶

Demokrasi pendidikan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, demokrasi secara horizontal. Yaitu setiap anak harus mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan di sekolah. Di Indonesia hal ini jelas tercermin dalam UUD 1945 Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kedua, demokrasi secara vertikal. Yaitu setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.⁵⁷

Terdapat 3 indikator pendidikan menurut BPS yaitu: rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah.

- 1) Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: Partisipasi sekolah, Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki, Ijazah tertinggi yang dimiliki dan Tingkat/ kelas tertinggi yang pernah diduduki.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 51

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 54

⁵⁷ *Ibid.* , Hlm. 56

- 2) Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.⁵⁸
- 3) Angka partisipasi sekolah adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perhitungan angka partisipasi sekolah dapat dilakukan dengan:

$$APS = (\text{jumlah penduduk yang masih sekolah pada golongan usia tertentu} : \text{jumlah penduduk pada golongan usia tertentu}) \times 100.$$
⁵⁹

Ayat dan hadis tentang pentingnya ilmu :

- a. QS. Al Imran[3] : 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَوَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّسُلَ بِمَا بَايَعُوا بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

- b. Qs. Al-Mujadalah [58]:11

... اللَّهُ الَّذِي يَنْ أَمَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْحِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“...Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁶⁰

- c. HR. Thabrani:

“Pelajarilah ilmu dan untuk ilmu belajarlah dengan tenang dan pelan-pelan serta sikap rendah hati terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu kepadamu.”⁶¹

⁵⁸ <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=variabel/view&id=12244> diakses pada 21-5-2018

⁵⁹ <https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html> diakses pada 21-5-2018

⁶⁰ Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam*, Hlm. 22

⁶¹ *Ibid* ,Hlm. 26

6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁶²

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.⁶³

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adalah suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁶⁴

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Menurut Amartya Sen, kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata.⁶⁵

Sehingga dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah keadaan seseorang yang berada dibawah

⁶² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Hlm. 326

⁶³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), Hlm. 190

⁶⁴ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hlm. 16

⁶⁵ Rusida Yulianti, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Dibuat: 22 Juli 2014 dalam <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/kemiskinan/166-pengukuran-kemiskinan-sebuah-pendekatan-ekonomi> Diunduh pada 02 Maret 2017 Pukul 19.00

standar masyarakat di sekitarnya baik dalam kualitas dan kuantitasnya terhadap kehidupan. Secara fisik, ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga menjadikan ia tertinggal dari perkembangan dan pembangunan ekonomi di daerahnya. Kemiskinan dilihat dari berbagai segi. Tidak hanya segi ekonomi juga sosial, politik, geografis, kekuasaan dan psikologi.

Kemiskinan mempunyai arti yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Secara umum kemiskinan dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.⁶⁶ Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang benar-benar miskin hingga sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup yang didasarkan pada kebutuhan yang bersifat universal seperti kebutuhan makanan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan yang dianggap miskin karena dibanding dengan kondisi lingkungan sekitar yang lebih kaya, sehingga yang menjadi patokan kemiskinan ini adalah lingkungannya.

Kemiskinan menurut pendapat umum dapat dikategorikan dalam 3 unsur yaitu:

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh aspek badaniyah atau mental seseorang.
- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam.
- c. Kemiskinan buatan.⁶⁷

⁶⁶ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, ..., Hlm. 327

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 328

Keterangan:

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh aspek badaniyah atau mental seseorang.

Kemiskinan kategori ini menitik beratkan dari faktor bawaan seseorang. Orang yang cacat secara fisik, dapat menjadi penyebab kemiskinan karena ia tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang normal pada umumnya.

Kekurangan (cacat) dalam hal ini tidak hanya berarti cacat secara fisik melainkan juga secara mental. Orang yang terlahir dengan kelainan mental, autisme dan sejenisnya juga dapat mengakibatkan kemiskinan pada diri orang tersebut. Secara umum, keadaan mental seseorang akan mempengaruhi cara pikir dan juga tindakan seseorang. Saat mental seseorang terganggu, maka hal itu menjadi kendala bagi orang tersebut untuk berkarya dan beraktivitas layaknya orang normal. Namun hal ini tidak berarti mereka yang mengalami gangguan mental tidak mampu berkarya. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan.

- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam

Bencana alam adalah salah satu penyebab terjadinya kemiskinan pada sebagian atau sekelompok orang. Dengan

terjadinya bencana alam, maka harta (ekonomi) yang dimiliki bisa berkurang atau bahkan hilang, yang mengakibatkan kemiskinan. Seringkali bencana yang terjadi mengakibatkan kemiskinan yang diiringi pula oleh penurunan kesehatan masyarakat yang juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Seperti bencana banjir yang pernah menimpa Aceh beberapa tahun silam, bencana itu mengikis perekonomian Aceh, menurunkan tingkat kesehatan, dan meningkatkan pengangguran.

c. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan disini adalah keadaan dimana seseorang tidak benar-benar miskin, namun ia mengaku miskin. Adapun yang menjadi alasan seseorang mengaku miskin antara lain adalah untuk menghindari membayar pajak, dan ingin memperoleh bantuan dari pemerintah.

Ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious cycle of poverty*).⁶⁸

Dari uraian diatas, maka yang menjadi faktor penyebab kemiskinan adalah faktor sumber daya alam, sumber daya manusia

⁶⁸ Subandi, Riduwan (Ed), *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 78

dan juga perbedaan akses dalam modal. Pada saat seseorang memiliki sumberdaya manusia yang rendah (pendidikan dan ketrampilan), maka sulit baginya untuk mengembangkan usaha dan berinovasi, apalagi jika tidak didukung oleh sumber daya alam. Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik dalam modal, bahan, atau ketrampilan, maka penghasilan yang diperoleh akan rendah. Rendahnya penghasilan akan menyebabkan tingkat investasi dan tabungan rendah karena penghasilan yang diperoleh hanya terpusat untuk kebutuhan pokok. Sehingga siklus seperti ini akan terus berputar.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan:

- a. Pendidikan yang terlampau rendah.
- b. Malas Bekerja
- c. Keterbatasan Sumber Alam.
- d. Terbatasnya lapangan kerja.
- e. Keterbatasan Modal.
- f. Beban Keluarga⁶⁹

Keterangan:

- a. Pendidikan yang terlampau rendah

Pendidikan adalah faktor utama yang mempengaruhi perekonomian. Tingkat pendidikan yang rendah, biasanya menggambarkan ketrampilan dan kompetensi yang rendah pula. Ketika kemampuan seseorang rendah, maka tingkat pekerjaan seseorang akan rendah. Rendahnya tingkat pekerjaan akan mengakibatkan rendahnya upah yang diperoleh. Upah yang rendah tidak mencukupi kebutuhan

⁶⁹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* ,..., Hlm. 344

dasar hidup. Sehingga kondisi seperti ini dapat menjadi penyebab seseorang dikategorikan miskin.

b. Malas Bekerja

Faktor intern merupakan hal yang penting dalam menentukan kemana arah kehidupan akan dibawa. Jika semangat berjuang rendah, maka dalam menjalani hidup seseorang tersebut akan bermalas-malasan. Ketika rasa malas itu ada, maka seseorang terkesan menerima takdir. Padahal ia belum berusaha. Cara fikir dan semangat diri ini merupakan hal dasar yang penting untuk merubah keadaan seseorang. Sehingga untuk melakukan perubahan, baiknya dimulai dari dalam diri.

c. Keterbatasan Sumber Alam

Sumber daya alam adalah penting dalam menentukan perekonomian. Sumber daya alam yang melimpah mampu menjadi pendorong perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Sebaliknya sumber daya alam yang rendah menjadikan suatu negara mencari negara pemasok sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi atau konsumsi. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan. Dengan mengandalkan negara lain sebagai pemasok, maka jumlah impor suatu negara akan tinggi dan akan

mempengaruhi neraca pembayaran menyebabkan defisit anggaran. Dampaknya kemiskinan akan semakin parah.

d. Terbatasnya lapangan kerja

Jumlah lapangan kerja mempengaruhi kemiskinan. Ketika lapangan kerja terbatas, maka dipastikan jumlah pengangguran akan meningkat. Meskipun seseorang tidak bekerja, kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Meningkatnya pengangguran dapat mengakibatkan meningkatnya kemiskinan pula. kemiskinan yang tinggi mengakibatkan tingkat kriminalitas tinggi dan kekacauan dalam perekonomian.

e. Keterbatasan Modal

Modal yang terbatas mengakibatkan upaya menjalankan usaha terhambat. Seseorang membutuhkan modal untuk mendukung kegiatan usaha. Dengan hambatan modal, maka kreatifitas dan inovasi terhambat sehingga upaya mengurangi kemiskinan melambat.

Biasanya untuk mengatasi hambatan berupa keterbatasan modal, seseorang meminjam sejumlah dana pada pihak lain sebagai modal, namun hal ini juga berdampak pada kelanjutan usaha. seringkali pinjaman disertai dengan bunga yang dipatok diawal kesepakatan, sedangkan keuntungan atas usaha belum bisa dipastikan.

Bunga mungkin tidak begitu terasa, bila usaha yang dijalankan mampu memberikan hasil yang memuaskan. Namun sebaliknya, bunga terasa memberatkan manakala usaha yang dijalankan belum bisa memberi keuntungan. Sehingga untuk mengembalikan pinjaman terasa sulit. Dan memungkinkan debitor terjatuh dalam hutang.

f. Beban Keluarga

Semakin banyak jumlah beban keluarga, maka semakin banyak pula ekonomi yang dibutuhkan. Ketika kebutuhan tidak tercukupi, maka ia tergolong miskin. Seorang pegawai misalnya dengan gaji dua juta perbulan dengan beban keluarga delapan, dapat dikatakan miskin, karena penghasilan tersebut pada kenyataannya tidak mampu mencukupi kebutuhan makan, pendidikan dan kesehatan seluruh beban keluarga, meskipun penghasilan itu mungkin lebih tinggi dibanding dengan penghasilan seseorang yang tidak memiliki beban keluarga.

Terdapat petunjuk dari salah satu hadis yang mengungkapkan sebab-sebab kemiskinan yang berbunyi:

*“...aku mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan (al-‘ajz),” kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit hutang dan diperas atau dikuasai sesama manusia.”*⁷⁰

Telah berulang kali dibuktikan adanya hubungan erat antara kekayaan materi dengan kondisi kesehatan. Juga dapat dijelaskan secara khusus prosentase kematian bayi memiliki keterkaitan sangat erat dengan indikator-indikator perkembangan ekonomi seperti halnya

⁷⁰ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan,....*, Hlm. 17

dengan penghasilan nasional rata-rata perkapita (GNP). Beberapa penelitian di Amerika Serikat sendiri juga menunjukkan adanya hubungan antara penghasilan seseorang dengan berbagai penyakit. Dapat disimpulkan bahwa berbagai penyakit yang mengakibatkan timbulnya kelemahan dan kelumpuhan jangka panjang atau pendek lebih sering dijumpai pada anggota-anggota keluarga miskin dibanding pada keluarga-keluarga berpenghasilan tinggi. Karena itu, menurut Nabil Subhi Al Thawil tidaklah mengherankan bila kondisi kesehatan dinegara-negara terbelakang juga menjadi terbelakang, seperti halnya dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi.⁷¹

Beberapa penyebab masalah pengentasan kemiskinan antara lain adalah: pertama, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan menghadapi tahapan kejenuhan sejak pertengahan 1980an. Ini juga berarti bahwa upaya untuk mengurangi jumlah orang miskin pada tahun 1970an telah maksimal. Oleh karena itu pada awal 1990an, masih terdapat banyak orang miskin. Kedua, bertepatan dengan kemandegan upaya diatas terdapat kecenderungan kearah ketidakmerataan pendapatan yang melebar antara sektor-sektor, kelompok-kelompok, dan regional-regional. Yang terakhir, isu kemiskinan yang akhir-akhir ini adalah berhubungan dengan masih terdapatnya lebih dari 11,5 juta keluarga yang "hampir miskin".⁷²

Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang (NSB):

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
- b. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional pertambahan produk barang-barang.
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital insentive*), sehingga prosentasi pendapatan modal dari harta tambahan besar di bandingkan dengan prosentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
- e. Rendahnya mobilitas sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis.
- g. Memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan negara terhadap barang ekspor NSB.

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 40

⁷² Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm. 22

h. Hancurnya industri industri kerajinan rakyat seperti; pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.⁷³

Pengukuran luas kemiskinan dilakukan melalui usaha-usaha penetapan garis kemiskinan. Dengan menggunakan kriteria tertentu ditetapkan garis kemiskinan, yang selanjutnya proporsi penduduk di bawah garis ini digolongkan miskin. Umpamanya garis kemiskinan di Indonesia yang ditetapkan oleh Sajogyo, pada mulanya menggunakan tingkat pendapatan (lebih tepatnya pengeluaran) perkapita per tahun setara dengan 240 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 3660 kg beras bagi penduduk perkotaan. Tetapi dalam penggolongan yang dilakukan selanjutnya, Sajogyo menetapkan batas tingkat pengeluaran per kapita per tahun setara kurang dari 240 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 360 kg beras bagi penduduk perkotaan tergolong miskin sekali. Sedangkan pengeluaran setara kurang dari 180 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan tergolong paling miskin. Yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran setara kurang dari 320 kg beras untuk penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan.

Biro Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori per kapita per hari. Suatu keluarga digolongkan sangat miskin jika pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan kalori minimum yang ditetapkan, sedangkan bila pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan kalorinya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang dan pendidikan digolongkan keluarga miskin. Dewasa ini untuk patokan Internasional, bank Dunia menggunakan kriteria pendapatan kurang dari US\$ 2 per kapita per hari digolongkan sebagai penduduk miskin dan pendapatan kurang dari US\$ 1 per kapita per hari sebagai penduduk sangat miskin⁷⁴

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada praktiknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70 sedangkan untuk negara-negara yang berdistribusi pendapatan relative merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.⁷⁵

⁷³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*,, Hlm. 72

⁷⁴ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*,... Hlm. 172-713

⁷⁵ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi*.... Hlm. 238

Tabel 2.1 Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
X=0	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
X=1	Tidak merata sempurna

Sumber: Michael P Todaro, Pembangunan Ekonomi, 2006

Telah diketahui bahwa koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteri yang sangat dicari, yaitu, prinsip anomalitas, independensi skala, independensi populasi dan transfer⁷⁶.

1. Prinsip anomalitas.

Ukuran ketimpangan tidak tergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Entah itu orang yang kaya atau yang miskin.

2. Prinsip independensi.

Ukuran ketimpangan tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara atau cara kita mengukur pendapatannya.

Hal ini berarti ukuran ketimpangan tidak tergantung pada satuan alat ukur pendapatan berupa dolar, sen atau rupiah.

3. Prinsip independensi populasi.

⁷⁶ *Ibid*,... Hlm. 239

Pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk).

4. Prinsip transfer.

Menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin, maka akan dihasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Perhitungan Koefisien Gini:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

GR : koefisien Gini

P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

a. Bekerja keras (QS. Al Mulk (67):15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

صلى وَاِلَيْهِ النُّشُورُ

“ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

QS. Al-Jumuah(62): 10

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*⁷⁷

QS. Adz- Dzariyat, 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّسَاءِئِلٍ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*⁷⁸

- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat.
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah tathawwu' kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya dan bantuan sukarela dan kebaikan hari secara individual dan insidental.⁷⁹

⁷⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*,, Hlm. 54

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga, Edisi Sakinah*,... Hlm. 521

⁷⁹ Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*,... Hlm. 83

B. Kajian Penelitian

Beberapa penelitian yang membahas topik mengenai pertumbuhan penduduk, pengangguran, kesehatan, pendidikan dan kemiskinan yang dapat dijadikan dasar oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Yacoub⁸⁰, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di kota/kab di Provinsi Kalimantan Barat. Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah, salah satu variabel bebas yang digunakan oleh peneliti adalah pengangguran dengan variabel independennya adalah kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah lingkup penelitian dan metode yang akan digunakan oleh penelitian adalah kuantitatif dengan alat analisis regresi linier berganda.
2. Arumsari,⁸¹ dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, 2) pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan, 3) pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, 4) pengaruh UMR terhadap kemiskinan, 5)

⁸⁰Yarlina Yacoub, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat" Jurnal Eksos, Volume 8 No 3, Oktober 2012, dalam http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06eksos%204%20yarlina%20okt12.pdf diakses pada 01-11-2017

⁸¹Fredila Putri Arumsaari, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pendidikan, UMR dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014" dalam http://eprints.ums.ac.id/51156/24/NASKAH%20PUBLIKASI_fredila.pdf diakses pada 13-12-2017

pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan, 2) pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan, 3) pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan, 4) UMR berpengaruh negatif signifikan, 5) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada beberapa variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah pada wilayah penelitian, periode serta penambahan satu variabel bebas yaitu kesehatan.

3. Sanusi dkk⁸², dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap kemiskinan, 2) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan, 3) pengaruh pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi 4) pengaruh jumlah tenaga kerja, pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
1) tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 2) pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap

⁸² Dewi Kurniawati Sanusi, Anderson Kumenanung, Debby Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No 2, Mei 2014, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4732> diakses pada 01-11-2017

pertumbuhan ekonomi, 4) secara simultan tenaga kerja, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan secara simultan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan yaitu pendidikan, dan variabel terikatnya adalah kemiskinan. Perbedaannya terletak pada alat analisis dan wilayah penelitian.

4. Astrini A, dkk⁸³, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan dari PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini menunjukkan kesimpulan penelitian bahwa PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, melek huruf berpengaruh negatif signifikan, dan pengangguran berpengaruh positif signifikan pada kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menambah satu variabel baru yaitu kesehatan.

⁸³ Ni Made Myanti Astrini A, Ada Bagus Putu Purbodharmojo, “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”, E-Jurnal EP Unud Volume 2 No 8, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/5302/0> diakses pada 01-11-2017

5. Yudha⁸⁴ dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, 2) pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan, 3) pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan 4) inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, 2) Upah minimum berpengaruh positif signifikan, 3) pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan, 4) inflasi berpengaruh positif signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan sama. Variabel bebas yang digunakan yaitu pengangguran. Kemiskinan sebagai variabel terikat. Perbedaannya adalah peneliti menambahkan variabel baru yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
6. Wijayanto⁸⁵, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh PDRB terhadap kemiskinan, 2) pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan 3) pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan, 4) pengaruh variabel PDRB, pendidikan dan pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Kab/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 2) pendidikan berpengaruh negatif

⁸⁴Okta Ryan Pranata Yudha, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2012", dalam <http://lib.unnes.ac.id/17313/1/7111409012.pdf> diakses pada 01-11-2017

⁸⁵ Ravi Dwi Wijayanto, "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2005-2008", dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/5892> diakses pada 01-11-2017

signifikan terhadap kemiskinan, 3) pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 4) secara bersama-sama PDRB, pendidikan, dan pengangguran berpengaruh sebesar 96,8%, Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah wilayah penelitian dan peneliti menambah dan mengurangi beberapa variabel.

7. Rise⁸⁶ dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai:
- 1) pengaruh pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin, 2) pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin, 3) pengaruh kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin, 4) pengaruh pendidikan, pengangguran dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatra Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pendidikan secara parsial berpengaruh negatif signifikan pada jumlah penduduk miskin, 2) jumlah pengangguran positif parsial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, 3) tingkat kesehatan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, 4) pendidikan, pengangguran dan kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pengaruhnya sebanyak 96,9%. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan dan metode penelitiannya. Sedangkan yang membedakan

⁸⁶ Addiana Rise, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Barat tahun 2000-2013", dalam <http://www.google.com/url?sa=t&rect=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwicqZqs-6TXAhUMMo8KHa0MCZE4ChAWCCswAQ&url=http%3A%2F%2Fjim.stkip-pgri-sambar.ac.id%2Fjurnal%2Fdownload%2F23&usg=AOvVaw0eqbj0r2AXechnVHCd-3H9> diakses pada 01-11-2017

adalah adanya penambahan variabel yaitu pertumbuhan penduduk dan wilayah penelitian.

8. Permana⁸⁷, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh PDRB terhadap kemiskinan, 2) pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan, 3) pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, 4) pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009. Dengan hasil: 1) laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 2) pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, 3) pendidikan berpengaruh negatif signifikan, 4) kesehatan berpengaruh negatif signifikan. Penelitian variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen 0,95. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada wilayah penelitian dan penambahan variabel baru.
9. Sari dan Natha⁸⁸, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin, 2) pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk miskin, 3) pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin

⁸⁷ Anggit Yoga Permana dan Fitrie Arianti, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009", *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 1, No 1 tahun 2012, dalam <http://eprints.undip.ac.id/36162/1/PERMANA.pdf> diakses pada 01-11-2017

⁸⁸ Novi Astika Sari dan Ketut Suardikha Natha, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Bali 1999-2013", *E-Jurnal EP Unud* Volume 5 No 12, dalam https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMmv_BxIjYAhUJNY8KHQ3nCq0QFghhMAc&url=https%3A%2F%2Ffojs.unu.d.ac.id%2Findex.php%2Ffeep%2Farticle%2Fview%2F24429%2F16750&usg=AOvVaw3hEYSBdnb0A41skkKX_NMt diakses pada 13-12-2017

4) pengaruh PDRB, pertumbuhan penduduk dan inflasi secara simultan terhadap kemiskinan di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 2) pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan, 3) inflasi berpengaruh positif signifikan, 4) Variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Bali. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada teknik analisis yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda, variabel dependen yang digunakan yaitu kemiskinan dan variabel pertumbuhan penduduk sebagai variabel independennya.

10. Astuti A⁸⁹, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin, 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin, 3) pengaruh pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin, 4) pengaruh kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) populasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, 3) pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 4) kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan pada variabel bebas yang digunakan yaitu pertumbuhan penduduk,

⁸⁹Restu Ratri Astuti A, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2004-2015" Dalam http://eprints.uny.ac.id/17756/1/skripsi%20full_Restu%20Ratri%20Astuti_10404244017.pdf diakses pada 13-12-2017

pendidikan dan kesehatan dengan variabel terikat yaitu kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan dan adanya penambahan variabel bebas yaitu pengangguran.

11. Syahrullah⁹⁰, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh PDRB terhadap kemiskinan, 2) pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, 3) pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PRDB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 2) Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan, 3) pengangguran berpengaruh positif signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan yaitu pengangguran dan pendidikan serta variabel terikat yaitu kemiskinan.
12. Widyasworo⁹¹, dalam penelitiannya yang merumuskan permasalahan mengenai: 1) pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, 2) pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan, 3) pengaruh angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan. Menunjukkan hasil bahwa: 1) pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, 2) kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan, 3) angkatan kerja wanita berpengaruh negatif signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah

⁹⁰ Dio Syahrullah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten 2009-2012”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29240/1/DIO%20SYAHRULLAH-FEB.pdf> diakses pada 13-12-2017

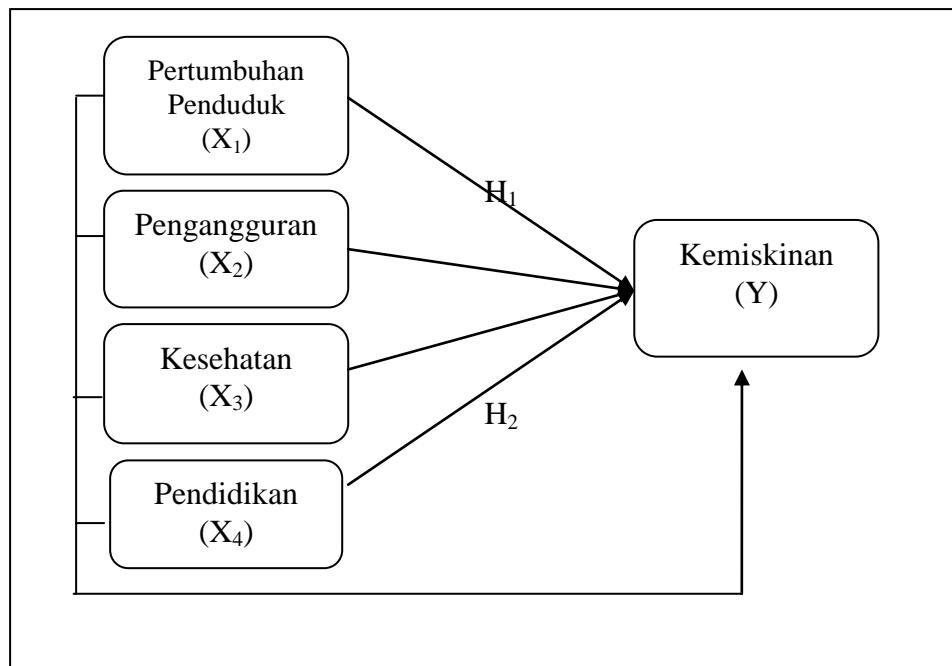
⁹¹Radhitya Widyasworo “Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Angkatan Kerja Wanita terhadap Kemiskinan di Gresik tahun 2008-2012”, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189593&val=6467&title=Analisis%20Pengaruh%20Pendidikan,%20Kesehatan,%20dan%20Angkatan%20Kerja%20Wanita%20Terhadap%20Kemiskinan%20di%20Kabupaten%20Gresik%20%28Studi%20Kasus%20Tahun%202008-2012%29> diakses pada 13-12-2017

variabel yang digunakan yaitu pendidikan, kesehatan dan kemiskinan serta alat analisis yang digunakan. Perbedaannya adalah pada wilayah penelitian dan variabel tambahan yang sengaja ditambahkan oleh peneliti.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *variable dependent* (Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan) dengan *variable independent* (Kemiskinan) di atas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian diartikan sebagai proporsisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.⁹² adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat hubungan antara Pertumbuhan Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hipotesis ini sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Restu Ratri Astuti A, dengan tema “ Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2004-2015.”⁹³

H₂ : Terdapat hubungan antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hipotesis ini sesuai penelitian terdahulu menurut Yarlina Yacoub, dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.⁹⁴

H₃ :Terdapat hubungan antara Kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hipotesis ini sesuai penelitian terdahulu menurut Anggit Yoga Permana dengan tema Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009.⁹⁵

H₄ :Terdapat hubungan antara Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hipotesis sesuai penelitian terdahulu menurut Radhitya

⁹² Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan praktis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), Hlm. 46

⁹³ Restu Ratri Astuti A, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2004-2015” Dalam http://eprints.uny.ac.id/17756/1/skripsi%20full_Restu%20Ratri%20Astuti_10404244017.pdf diakses pada 13-12-2017

⁹⁴ Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat” Jurnal Eksos, Volume 8 No 3, Oktober 2012, dalam http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06eksos%204%20yarlina%20okt12.pdf diakses pada 01-11-2017

⁹⁵ Anggit Yoga Permana dan Fitri Arianti, “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009”, *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 1, No 1 tahun 2012, dalam <http://eprints.undip.ac.id/36162/1/PERMANA.pdf> diakses pada 01-11-2017

Widyasworo yang bertema “Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Angkatan Kerja Wanita terhadap Kemiskinan di Gresik tahun 2008-2012.”⁹⁶

H₅ : Terdapat hubungan pertumbuhan penduduk, pengangguran, kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

H₆ : Terdapat pengaruh yang lebih dominan dari salah satu variabel bebas (pertumbuhan penduduk, pengangguran, kesehatan atau pendidikan) terhadap kemiskinan.

⁹⁶Radhitya Widyasworo “Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Angkatan Kerja Wanita terhadap Kemiskinan di Gresik tahun 2008-2012”, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189593&val=6467&title=Analisis%20Pengaruh%20Pendidikan.%20Kesehatan.%20dan%20Angkatan%20Kerja%20Wanita%20Terhadap%20Kemiskinan%20di%20Kabupaten%20Gresik%20%28Studi%20Kasus%20Tahun%202008-2012%29> diakses pada 13-12-2017